

Hak Angket Senjata Pamungkas

Oleh Erwan Effendi

Jika merujuk dasar penggunaan hak angket di atas, dapat dipastikan belum layak mengantarkan "syahwat" anggota dewan Batubara

Hasil penyelidikan Panitia Angket yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD Batubara, Jumat (11/2), mengungkapkan bahwa Wakil Bupati Batubara Drs H. Gong Matua melanggar sumpah dan janji jabatan. Di samping itu, panitia angket juga menemukan pelanggaran hukum yakni memalsukan surat.

Sebagai masyarakat tentunya kita sangat puas terhadap buah dari kerja anggota DPRD Batubara yang secara maksimal telah menggunakan haknya. Kerja keras Panitia Angket dalam menelusuri kinerja Wabub selama 40 hari ketika ditinggal bupati, merupakan prestasi cukup baik dan itu baru terjadi sepanjang sejarah terbentuknya Kabupaten Batubara. Pantas diberi acuan jempol.

Hak angket adalah hak dewan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak angket selalu menjadi senjata pamungkas bagi anggota dewan terhadap eksekutif (pemerintah) dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas di samping fungsi legislasi (fungsi membahas dan memberikan persetujuan atau tidak terhadap rancangan peraturan daerah (Perda) yang diajukan pemerintah.

Tingginya "syahwat" anggota DPRD Batubara dari lintas fraksi menggunakan hak angket terhadap Wabub menimbulkan berbagai pertanyaan di kalangan tokoh masyarakat Batubara. Sebab, jika yang dilakukan Wabub hanya sebatas melanggar sumpah dan janji jabatan serta pelanggaran hukum—seperti tuduhan menggunakan stempel palsu, karena membebas-tugaskan kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), melakukan MoU dengan Unpad dalam proses penerimaan CPNS 2010—terasa tidak adil bahkan merupakan penzaliman.

Jika merujuk dasar penggunaan hak angket di atas, dapat dipastikan belum layak mengantarkan "syahwat" anggota dewan Batubara untuk menggunakan hak angket. Karena tidak ada negara yang dirugikan begitu juga masyarakat bahkan bukan hal yang sangat strategis dilakukan Wabub. Apalagi tuduhan melanggar sumpah dan janji jabatan, sungguh sangat tendensius. Tetapi mengapa para anggota dewan memaksakan diri untuk tetap menggunakan hak angket. Gambaran itu mencerminkan bahwa para anggota dewan terhormat tidak lagi berfikir bemas, arif dan cerdas dalam menyikapi suatu persoalan, tapi selalu mengedepankan kepentingan pribadi.

Jika orientasi pembentukan panitia angket penuh dengan muatan politik hingga menafikan akal sehat, maka kebijakan itu jelas merupakan penzaliman terhadap umat manusia yang berujung pada pembunuhan karakter. Secara empiris, indikasi kezaliman yang berintegrasi dengan ketidakadilan itu terlihat dimana dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh orang pertama di jajaran Pemkab Batubara jauh lebih berat dibanding tuduhan terhadap Wabub. Bahkan berdampak luas dan langsung menyentuh pada kehidupan masyarakat dan bahkan merugikan Negara. Akan tetapi mengapa hal itu tidak pernah dibicarakan para anggota dewan untuk membentuk panitia angket. Sikap diskriminatif itu pasti akan menimbulkan kebencian dan kemarahan masyarakat.

Sudah banyak laporan elemen masyarakat baik lisan maupun tulisan bahkan sampai pada aksi ratusan masyarakat kepada dewan seperti tentang dugaan penyimpangan pembangunan tujuh kantor SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) termasuk pengadaan lahannya dan pengadaan komputer untuk pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) online. Bahkan dugaan itu juga sudah dilaporkan ke KPK, Poldasu dan Kakajatisu. Akan tetapi, para anggota dewan seperti menutup mata, telinga dan hati, sehingga seperti tak mampu lagi melihat mana yang



haq dan mana yang bathil. Mungkin inilah yang dimaksud Allah dalam firmanNya: *Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat* (Al-Baqarah: 7).

Padahal, sebagai anggota dewan yang digaji oleh rakyat, mereka memiliki kewajiban, antara lain; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituen di daerah pilihannya. Justru, sejauh mana kewajiban ini sudah dilaksanakan? Ironisnya, dalam konteks ini ada pejabat di jajaran Pemkab Batubara turut latah menegaskan bahwa putusan panitia angket merupakan keinginan masyarakat Batubara. Penegasan itu dapat diterima secara yuridis, namun secara de facto klaim itu jelas merupakan pembohongan publik dan ketidakjujuran seorang umaro, karena menafikan tuntutan

masyarakat yang selama ini minta dewan mengusut berbagai kasus dugaan penyimpangan pembangunan. Orang yang tidak jujur tidak harus diikuti, karena perkataannya cenderung sesat dan menyesatkan.

Kita juga tidak harus berpikir mengapa anggota dewan bersikap zalim dalam menyikapi suatu masalah. Padahal di dalam lembaga terhormat itu ada Fraksi Partai Golkar yang mengusung paradigma baru, artinya mengedepankan aspirasi masyarakat bukan penguasa seperti pada masa orde baru. Kemudian FPPP (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) yang berazaskan Islam serta mengklaim dirinya sebagai partai warisan ulama dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar*, Fraksi PDI

Perjuangan yang mengklaim diri sebagai pejuang wong cilik. Begitu juga PAN yang mengklaim diri sebagai partai reformasi, PKS, PBR, dan partai kecil lainnya seperti mati suri.

Sikap anggota dewan itu pasti akan menjadi guru paling berharga bagi masyarakat Batubara ke depan agar lebih selektif ketika menentukan pilihannya pada Pemilu 2013. Dengan pengalaman itu, masyarakat Batubara akan semakin cerdas dan penuh hikmah dalam menentukan hak politiknya, tidak terjebak dengan janji-janji manis para politisi yang ditabur pada masa kampanye. Tetapi, penentuan pilihan harus merujuk kepada perilaku dan *akhlaqul krimah* calon kepala daerah maupun calon legislatif yang baik, menepati janji dan berlaku adil. Sosok calon pejabat yang baik harus mencerminkan sifat Rasulullah Muhammad SAW yakni, *sidiq, amanah, tabligh dan fathanah*.

Penulis adalah Wartawan Waspada, Mahasiswa Komunikasi Islam, Pascasarjana IAIN

Rabou.
2/3-2011